

## KSAL Pastikan Pesawat Latih G-36 Bonanza Tak Ada Blackbox

JAKARTA (IM) - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan pesawat G-36 Bonanza milik TNI AL yang jatuh pada Rabu 7 September 2022 kemarin tidak memiliki blackbox.

Hal ini disampaikan dalam press conference di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur. "Jadi, pesawat latih ini gak ada blackbox," kata Yudo, Kamis (8/9).

Yudo mengatakan, pihaknya kini tengah mendalami penyebab kecelakaan ini. Adapun dipastikannya proses pencarian dan evakuasi dinyatakan selesai.

"Secepatnya kita pasti secepatnya (investigasi), jangan sampai tertunda lama," ucapnya.

TNI AL, kata Yudo, juga akan memberikan dampingan psikologis terhadap keluarga awak pesawat yang meninggal dunia. Dampingan psikologis juga turut diberikan kepada

para crew pilot yang berdinis di lingkungan TNI AL.

"Tentunya kita juga libatkan dinas psikologi angkatan laut untuk memberikan pendampingan," ujarnya.

Dua awak pesawat yang berada di Pesawat G-36 Bonanza dinyatakan meninggal dunia atas kecelakaan pesawat yang terjadi di Selat Madura pada Rabu (7/9) kemarin. Keduanya mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa atas jasanya.

Dua awak pesawat itu ialah Lettu (p) Judistira Eka Permady sebagai pilot dan Copilot Letda (p) Dendy Kresna Bakti Sabili.

"Keduanya mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa, sudah diajukan dan sudah turun," kata Yudo.

La menjelaskan, keduanya mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat dari pangkat sebelumnya.

"Naik satu tingkat," katanya. ● mei

## Eks Menteri ESDM Jero Wacik Bebas dari Lapas Sukamiskin

BANDUNG (IM) - Eks Menteri Energi Sumber Daya Alam Jero Wacik bebas dari Lapas Klas I A Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat dengan status cuti menjelang bebas (CMB).

Dari informasi yang didapat, terpidana korupsi ini ke luar dari Lapas Sukamiskin, Kamis (8/9) sekitar Pukul 14.00 WIB. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Balai Permissyarakatan (Bapas) Bandung Bambang Ludiro.

"Sudah CMB," kata Bambang kepada wartawan di Kantor Bapas Bandung.

Bambang menyebut, hingga dua bulan ke depan Jero Wacik diwajibkan melakukan wajib lapor dua minggu sekali atau minimal sebulan sekali.

"Masa pembimbingan cuti menjelang bebas sampai 21

November 2022. Kurang lebih dua bulan," sebutnya.

Bambang menambahkan, Jero Wacik dijemput oleh anaknya dan saat melakukan laporan sebelum menjalani CMB ke Bapas Bandung juga ditemani oleh anaknya.

"Rumah di Bandung ada daerah Arcamanik, tapi tadi yang jemput anaknya dari Jakarta, dia kan basecamp-nya di daerah Bintaro Jakarta," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Jero Wacik dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun. Hukuman itu sempat mendapat banding, tetapi putusannya tetap hingga akhirnya diajukan kasasi. Mahkamah Agung (MA) kemudian memperberat hukuman Jero menjadi 8 tahun penjara. ● han



FOTO: ANT

KPK AMBIL ALIH KASUS KORUPSI DI NTT  
Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Irjen Pol Didik Agung Wijanarto (tengah), Kapolda NTT Irjen Pol Setyo Budiyo (kiri), dan Kajati NTT Hutama Wisnu melakukan salam komando usai menggelar jumpa pers di Mapolda NTT, Kupang, NTT, Kamis (8/9). KPK menyatakan mengambil alih kasus dugaan korupsi pengadaan benih bawang merah dengan nilai kontrak Rp9,6 miliar dengan kerugian negara sekitar Rp5,2 miliar yang sempat ditangani Polda NTT sejak tahun 2019.

## Pinangki Masih Wajib Lapor Setiap Bulan Selama 2 Tahun Lebih

JAKARTA (IM) - Pinangki Sirna Malasari mendampingi kantor Balai Permissyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Selatan pada Kamis (8/9) pagi, untuk memenuhi wajib lapor.

Setelah di keluarkan dari lembaga pemasyarakatan (lapas), mantan jaksa itu masih wajib lapor setiap bulam selama 2 tahun lebih.

"Ibu Pinangki wajib lapor diri setiap bulannya hingga 15 Desember 2024. Sesuai PPKM level 1 di DKI, maka pembimbingan dilakukan secara tatap muka," ujar Kepala Bapas Jakarta Selatan, Ricky Dwi Biantoro pada wartawan, Kamis (8/9).

Selain dikenakan wajib lapor, Jaksa Pinangki diharuskan mengikuti pembimbingan yang ditentukan oleh

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) setiap bulannya itu. Pembimbingan berupa kepribadian dan kemandirian, yang mana dilakukan secara tatap muka serta dengan sistem konseling.

Bapas Jakarta Selatan juga bakal melakukan evaluasi dan asesment atas pembimbingan yang dijalani Jaksa Pinangki. Disamping wajib lapor, Jaksa Pinangki diwajibkan mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 82 tahun 2022 tentang kemasyarakatan. "Tentunya saya yakin bu Pinangki bakal menaati kewajiban wajib lapornya. Karena sebagai klien lembaga pemasyarakatan, semenjak beliau di dalam Lapas pasti akan mengikuti yang sudah kita tetapkan," tuturnya. ● han

# 2 Polhukam

FOTO: ANT



## HEDDY LUGITO TERPILIH SEBAGAI KETUA DKPP

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terpilih Hedy Lugito (kedua kanan) didampingi para anggota J Kristiadi (kiri), Ratna Dewi Pettalolo (kedua kiri) dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (kanan) mengucapkan terima kasih sesuai konferensi pers di kantor DKPP, Jakarta, Kamis (8/9). Dalam sidang pleno, Hedy Lugito terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DKPP Periode 2022-2027.

# Perpres Terkait FIR Semakin Tegaskan Kedaulatan Ruang Udara Indonesia

Ruang udara yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna yang selama ini dikelola Singapura, kini pengelolannya kembali kepangkuan NKRI.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengesahan Persetujuan Flight Information Region (FIR) Indonesia dan Singapura.

Kepala Negara menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia. "Alhamdulillah, saya telah menandatangani Peraturan

sama semua pihak, saat ini pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kembali kepada NKRI.

"Ini menambah luasan Flight Information Region (FIR) Jakarta menjadi 249.575 kilometer persegi," imbuhnya.

Dengan adanya kesepakatan pengelolaan FIR tersebut, selain menegaskan kedaulatan ruang udara Indonesia, Presiden juga menyampaikan sejumlah manfaat lainnya, antara lain meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Selain itu, hal ini juga bisa meningkatkan pendapatan negara bukan pajak.

"Hal ini bisa menjadi momentum untuk modernisasi

peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan SDM Indonesia," lanjutnya.

Untuk diketahui, Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan antara

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura. Perpres tersebut telah diundangkan pada 5 September 2022. ● lus

## Personel Komcad Disiapkan hingga 40 Batalion, Ini Pesan Wapres Maruf

BANDUNG BARAT (IM) - Sebanyak 2.974 personel Komponen Cadangan Batas antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura. Perpres tersebut telah diundangkan pada 5 September 2022. ● lus

semisal dalam menghadapi bencana," ujar Ma'ruf Amin.

Wapres berpesan ke depannya, pelatihan pertahanan Komcad agar didesain dalam perspektif yang luas. Menggabungkan sekolah pertahanan konvensional dan ancaman non tradisional.

Pertahanan modern juga mengutamakan teknologi informasi dan komunikasi serta peralatan canggih berbasis digital, sehingga perlu dimasukkan di dalam kurikulum pelatihan.

Perlu dikembangkan narasi yang optimistik, dalam komunikasi publik terkait peran dan fungsi Komcad. Sehingga muncul kesadaran kolektif seluruh anak bangsa untuk ambil bagian dalam upaya bela negara yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk.

Selain itu, lanjut dia, promosi bela negara pada generasi muda membutuhkan terobosan yang inovatif, pelatihan yang kreatif, dan kekinian.

Agar bela negara efektif menjangkau berbagai kelompok. "Bagi yang telah ikut pelatihan, anggota Komcad harus tetap menjaga mandat dan terus menjadi inspirasi bela negara bagi masyarakat," ujarnya. ● mei

## Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tetap Hukum Direktur PT KMI 3 Tahun Penjara

PALANGKARAYA (IM) - Pengadilan Tinggi Palangkaraya menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya, yang menghukum Wang Xiu Juan alias Susi, Direktur PT Kutama Mining Indonesia (KMI), dan Mahyudin 3 tahun penjara.

Oihsk PT Tuah Globe Mining (TGM) yang merasa dirugikan atas perbuatan kedua terdakwa, mengapresiasi putusan pengadilan tinggi tersebut.

Onggo sebagai kuasa hukum PT Tuah Globe Mining mengatakan, kedua terdakwa seharusnya dihukum sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Namun menurut Onggo, pihaknya telah menemukan dugaan tindak pidana lain yang akan dilaporkan ke Polisi dalam waktu dekat ini.

"Pihak kami menemukan adanya bukti-bukti permulan atas dugaan tindak pidana lainnya yang akan segera kami laporkan dalam

waktu dekat. Klien kami PT Tuah Globe Mining sangat dirugikan atas ulah kedua terdakwa sejak tahun 2019. Mereka tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya tetapi hukum membuktikan bahwa akar carut marut sengketa berawal dari perbuatan kedua terdakwa," ujar Onggo, Kamis (8/9).

Kasus yang menjerat Susi dan Mahyudin berawal dari dugaan pemalsuan surat keterangan asal batu bara yang dilakukan Mahyudin pada 2019. Surat palsu itu dibuat agar dapat mengeluarkan batu bara milik PT Tuah Globe Mining.

Kemudian, kata jaksa batu bara tersebut dijual oleh Wang Xiu Juan alias Susi ke Tiengkok.

Setelah ada putusan PT Palangkaraya, belum ormasi apakah Susi dan akan menempuh upaya hukum lanjutan atau tidak. Apabila kedua terdakwa menempuh upaya hukum maka hal itu adalah hak dari para ter-

dakwa sebagaimana diatur dalam undang-undang.

"Kami menghormati setiap upaya hukum yang ditempuh oleh para terdakwa, namun Kami juga heran saat ini masih ada upaya-upaya dari PT Kutama Mining Indonesia yang mencoba mengganggu proses kegiatan penambangan PT TGM," ujarnya.

"Bagaimana mungkin direktur PT TGM sudah di dalam penjara tetapi masih ada pihak-pihak lain yang diduga mengatasnamakan KMI melakukan perbuatan hukum padahal direktur KMI hanya ada satu orang. Kami mengimbau dan akan menyurati kepala rutan dan Dirjen Pemasyarakatan agar mengawasi para terdakwa untuk tidak menggunakan alat komunikasi. Kami curiga bahwa jangan-jangan Wang Xiu Juan dan Mahyudin diduga mendapat keleluasaan menggunakan handphone di dalam tahanan di Lapas Katingan, Palangkaraya," tandas Onggo. ● lus

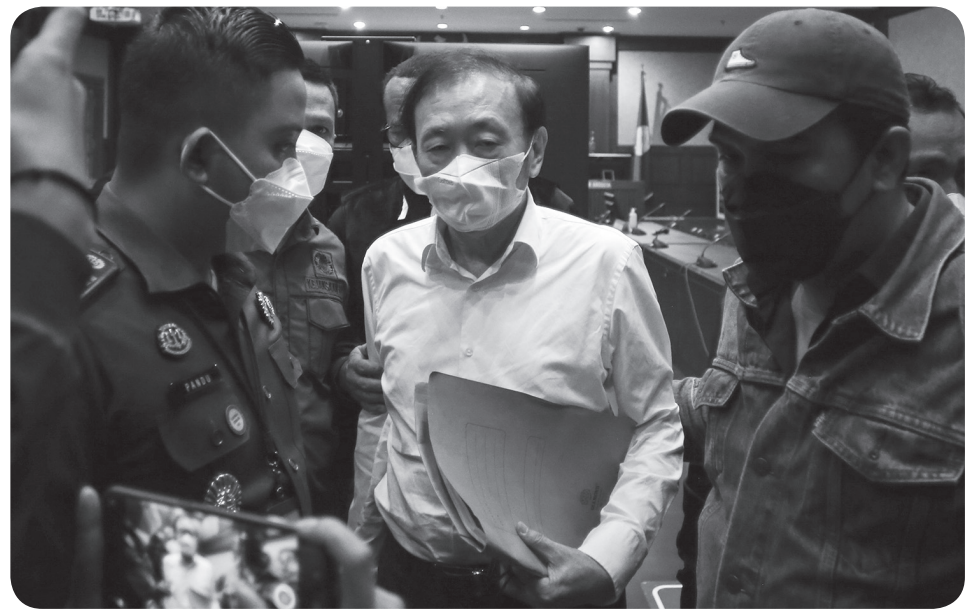


FOTO: ANT

## SIDANG DAKWAAN SURYA DARMADI

Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Surya Darmadi (tengah) berjalan meninggalkan ruangan usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/9). Pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma Surya Darmadi didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4,7 triliun dan US\$7.885.857,36 serta perekonomian negara sebesar Rp73,9 triliun terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

## KONFLIK INTERNAL PPP

### Kian Panas, Suharso Batalan Hasil Mukernas yang Melengserkannya

JAKARTA (IM) - Konflik yang terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kian memanas. Suharso Monoarfa yang dilengserkan dari jabatan Ketua Umum lewat musyawarah kerja nasional (Mukernas) melakukan perlawanan.

Upaya perlawanan yang dilakukan Suharso dengan membatalkan hasil Mukernas yang telah menunjuk Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum. Langkah ini telah ditetapkan dalam rapat pengurus harian yang digelar Selasa (6/9).

Ketua DPP PPP, Syaifulah Tamliha menyampaikan bahwa langkah untuk membatalkan hasil Mukernas itu didasari karena tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam AD/ART partai.

"Membatalkan rapat pengurus harian yang dikelola Pak Arsul Sani dan Pak Mardiono karena tidak sesuai dengan aturan partai, kan rapat itu harusnya setidak-tidaknya ditandatangani oleh sekjen,"

kata Tamliha kepada wartawan, Kamis (7/9).

Dalam AD/ART PPP telah diatur untuk forum pengambilan keputusan penting, maka harus ada tandatangan dari ketua umum dan Sekjen Partai. Sementara, Mukernas tersebut tidak ada undangan sebagaimana yang harus ditandatangani Ketua dan Sekjen. "Karena itu tidak sah dan ilegal maka semua hasilnya pun tidak sah," ujarnya.

Tamliha yang hadir dalam rapat pengurus harian tersebut memastikan, forum telah mencapai kuorum. Bahkan, rapat ini juga telah diketahui oleh Suharso dan Arwani Thomafi sebagai Sekjen.

"Rapat pengurus harian sudah dilaksanakan hari Selasa (6/9) di Jakarta dari siang sampai malam dan itu kuorum, yang hadir 26 orang dari 46, kan lebih saporuh. Ada dokumen dan tanda tangannya kok, saya kalau ada undangan yang ditandatangani ketua umum dan sekjen saya hadir," tandasnya. ● han

**PENAWARAN UMUM REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

PT Syailendra Capital, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi bermaksud melakukan penawaran umum REKSA DANA PT SYAILENDRA CAPITAL ("REKSA DANA") dengan rincian sebagai berikut:

- REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 55 yang telah memperoleh surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-786/SJ/PM.21/2022 tanggal 2 September 2022. Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 55 secara terus menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada masa penawaran.

Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA dapat diperoleh di Kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

**SYAILENDRA**

Jakarta, 9 September 2022  
Manajer Investasi  
PT SYAILENDRA CAPITAL  
District 8, Treasury Tower, 39th Floor, Unit 39A  
Sudirman Central Business District Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon: (62-21) 2793 9900  
Faksimili: (62-21) 2793 1199

"INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGENGUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. PT SYAILENDRA CAPITAL TERDAPAT DARI DIAMASI OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PENAWARAN PRODUK DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TERDAPAT DAN DIWAJABI OTORITAS JASA KEUANGAN"